

Kejagung Geledah Apartemen Stafsus Nadiem Makarim



Jakarta, MIMBAR - Kejagung menggeledah apartemen Stafsus eks Mendikbud Nadiem Makarim terkait kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut



17 Juta Buruh Akan Dapat Bantuan Rp600 Ribu

565 Ribu Guru Honorer

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo Subianto menambah bantuan subsidi upah (BSU) menjadi Rp600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

Rencana sebelumnya, Prabowo hanya akan memberikan BSU berjumlah Rp300 ribu untuk dua bulan. Setelah rapat di Istana hari ini, bantuan itu ditambah menjadi dua kali lipat.

"Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bu-

Eks PM Israel Cap Kabinet Netanyahu Penjahat Perang

Israel, MIMBAR - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyebut Benjamin Netanyahu dan kabinetnya sebagai penjahat perang.

Olmert mengakui tak bisa lagi membela Israel dari tuduhan kejahatan perang. Ia menyebut blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan pasukan Zionis dan



■ Bersambung ke Hal 11

Kasus Korupsi CSR KPK Panggil Eks Kadep Komunikasi BI Jadi Saksi

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial

■ Bersambung
ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik kepada 79,3 juta pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke bawah.

Pembatalan disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (2/6) sore ini. Ia mengatakan, pembatalan disebabkan oleh mekanisme penganggaran.

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Suap TKA

KPK Kembali Panggil Mantan Dirjen Binapenta Kemnaker

Jakarta, MIMBAR - KPK kembali memanggil dua mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kedua mantan pejabat Kemnaker yang kembali dipanggil sebagai saksi adalah Dirjen Binapenta 2020-2023 Suhartono dan Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto.

"Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait TPK (tindak pidana korupsi)

pengurusan rencana penggunaan Tenggara Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (2/6).

Kendati demikian, Budi belum memberikan materi pemeriksaan apa saja yang akan didalami kepada kedua orang tersebut.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi penempatan TKA yang terjadi di Direktorat Jenderal (Dirjen) Binap-

■ Bersambung ke Hal 11



DPR Bersuara Soal Pejabat Tak Kompeten

Harus Disingkirkan Karena Bebani Rakyat

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai pejabat yang tidak kompeten dan kerap melanggar undang-undang harus disingkirkan agar tidak membebani rakyat.

"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," kata Toha dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (2/6).

Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar

undang-undang, menurut dia, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan.

"Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," katanya.

Pernyataan itu dilontarkan Toha lantaran mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan jajaran pemerintahan dari pejabat

■ Bersambung ke Hal 11



■ Sial kali bah....

■ He..he..he..



Hidayah Diskon Listrik Tak Menyal

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Janji pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada sekitar 79 juta pelanggan rumah tangga tampaknya padam sebelum sempat menyal. Program yang rencananya dimulai pada 5 Juni 2025 dan berlaku hingga akhir Juli ini dibatalkan dengan alasan klasik: proses penganggaran belum tuntas. Alih-alih mendapat keringanan, masyarakat justru disuguhkan kenyataan pahit bahwa harapan mereka hanya sebatas wacana.

Keputusan ini tidak sekadar urusan teknis anggaran, tetapi menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola kebijakan publik: komunikasi yang terburu-



■ Bersambung ke Hal 11